

Terpapar Namun Tidak Percaya: Kesadaran dan Penerimaan Isu dalam Rilis Survei Nasional

Zakky Zidan¹, Idris Hemay²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dikirimkan: 25 Desember 2025

Direvisi: 8 Juni 2026

Diterbitkan: 9 Juni 2026

INTISARI

Kontroversi politik dapat dikenal luas tetapi tidak selalu diikuti penerimaan, sehingga muncul pola *exposure without belief*. Artikel ini menanyakan apakah tingginya *awareness* isu dalam rilis survei berbanding lurus dengan *acceptance* publik, serta pada isu dan segmen mana divergensi keduanya paling besar. Secara teoritis, studi ini bertumpu pada perbedaan paparan dan penerimaan dalam pembentukan opini publik serta menawarkan *awareness–acceptance gap* sebagai perangkat analitis untuk memetakan divergensi antara visibilitas isu dan penerimaan publik. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif atas tabulasi agregat survei telepon nasional ($n=1.286$; 17–20 Mei 2025) dengan menghitung *awareness–acceptance gap* dan membandingkannya lintas dukungan politik, demografi, wilayah, dan akses media. Hasil menunjukkan *awareness* dan *acceptance* tidak bergerak searah: satu tuduhan faktual memiliki *awareness* sangat tinggi tetapi *belief* rendah sehingga menghasilkan *gap* positif terbesar, sementara sejumlah item kebijakan dan evaluasi kinerja justru memperlihatkan *acceptance* melebihi *awareness*. Temuan juga menunjukkan bahwa *belief* lebih terkonsentrasi pada konstituensi politik dan lingkungan informasi tertentu meski *awareness* relatif tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa visibilitas isu merupakan proksi yang lemah bagi persuasi serta menunjukkan kegunaan *awareness–acceptance gap* sebagai kerangka yang replikabel untuk membaca rilis survei ketika mikrodata tidak tersedia.

KATA KUNCI

Kesadaran isu; Penerimaan publik; *Awareness–acceptance gap* (AAG); Misinformasi politik; Akses media.

Pendahuluan

Lingkungan informasi kontemporer membuat komunikasi politik semakin cepat, murah, dan mudah diperluas jangkauannya, tetapi sekaligus lebih rentan terhadap konten keliru dan menyesatkan. Kekhawatiran utamanya bukan sekadar misinformasi itu ada, melainkan potensi dampaknya terhadap akuntabilitas demokratis karena ia dapat mendistorsi persepsi warga tentang aktor politik, institusi, dan kinerja kebijakan. Lazer et al. (2018) menekankan bahwa persoalan

Korespondensi:

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat: Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, Indonesia.

Email: zakky.zidan22@mhs.uinjkt.ac.id.

“fake news” perlu dipahami sebagai agenda ilmu sosial multidisipliner yang terkait dengan insentif platform, amplifikasi algoritmik, dan kompetisi politik, bukan hanya persoalan etika media.

Pada saat yang sama, riset empiris yang kuat mengingatkan agar tidak menganggap misinformasi membanjiri konsumsi media harian secara merata. Sejumlah temuan menunjukkan porsi konsumsi berita dalam total konsumsi media relatif terbatas dan paparan “fake news” hanya bagian kecil dari keseluruhan konsumsi media (Allen et al., 2020). Namun, rata-rata yang kecil dapat menyembunyikan konsentrasi yang besar pada kelompok tertentu. Grinberg et al. (2019) menunjukkan bahwa paparan dan berbagi sumber misinformasi di Twitter pada pemilu AS 2016 sangat terkonsentrasi pada sebagian kecil pengguna. Pola serupa juga terlihat pada kunjungan ke situs yang dinilai tidak tepercaya yang tidak bersifat universal dan berpola menurut preferensi politik serta jalur platform (A. M. Guess, Nyhan, et al., 2020). Temuan-temuan ini menyiratkan bahwa misinformasi perlu dipahami sebagai persoalan distribusi: siapa yang terpapar, siapa yang terlibat, dan bagaimana polanya memetakan belahan politik.

Dinamika distribusional menjadi semakin relevan ketika politik digital berkelindan dengan identitas, polarisasi, dan amplifikasi terorganisir. Dalam konteks Indonesia, media sosial dapat membentuk “algorithmic enclaves” yang memperkuat antagonisme berbasis kelompok sehingga paparan kontroversi bisa luas tetapi pemaknaannya tetap tersegmentasi (Lim, 2017). Situasi seperti ini menuntut pembedaan analitis yang sering terlipat dalam perdebatan publik: terpapar klaim politik tidak sama dengan menerima klaim itu sebagai benar. Bahkan indikator perilaku seperti berbagi konten tidak selalu mencerminkan keyakinan; *veracity* berpengaruh lebih kuat pada penilaian akurasi dibanding niat berbagi, sehingga sirkulasi dan keyakinan dapat terpisah (Pennycook et al., 2021).

Menjelaskan mengapa paparan dan penerimaan bisa berpisah memerlukan kerangka tentang pemrosesan informasi politik dalam kondisi konflik dan ketidakpastian. Kerangka dominan adalah *motivated reasoning*: tujuan individu—terutama dorongan mempertahankan sikap awal atau identitas—membentuk cara mereka mengevaluasi informasi baru. Dasar mekanisme ini dibahas oleh Kunda (1990), sementara bukti “*biased assimilation*” menunjukkan evaluasi bukti yang asimetris dan dapat mendorong polarisasi sikap (Lord et al., 1979). Dalam politik, Taber dan Lodge (2006) memformalkan “*motivated skepticism*”, dan Lodge dan Taber (2013) menekankan peran proses afektif-asosiatif yang otomatis dalam penilaian politik.

Namun, *motivated reasoning* bukan satu-satunya mekanisme yang relevan. Sejumlah riset menekankan peran keterlibatan analitis dan perhatian pada akurasi: kerentanan terhadap headline palsu sering lebih terkait kurangnya penalaran daripada bias partisan murni (Pennycook & Rand, 2018). Di sisi lain, intervensi platform dapat memunculkan efek tak diinginkan; pelabelan sebagian konten sebagai “salah” dapat meningkatkan persepsi akurasi pada konten yang tidak diberi label melalui mekanisme *implied truth* (Pennycook et al., 2020). Ini berarti divergensi paparan–penerimaan perlu dibaca sebagai hasil gabungan motivasi terarah (identitas/attitude-protective) dan kendala non-terarah (atensi/akurasi/reflectiveness).

Walaupun literatur berkembang pesat, terdapat dua kesenjangan penelitian yang relevan untuk memahami kontroversi politik Indonesia yang berkembang secara cepat. Pertama, banyak bukti terkuat bertumpu pada mikrodata atau jejak perilaku yang memungkinkan pemodelan multivariat tentang siapa terpapar, siapa percaya, dan mengapa, sementara perdebatan publik Indonesia sering mengandalkan rilis survei berupa topline dan crosstab yang luas dikutip tetapi jarang dianalisis sistematis. Kedua, pembacaan deskriptif sering mencampur dua keluaran yang berbeda: apakah warga pernah mendengar isu dan apakah warga menerima isu itu sebagai kredibel. Dalam literatur, paparan sering dikaitkan dengan saliens isu dan visibilitas jaringan/platform, sedangkan penerimaan lebih sering dijelaskan melalui selektivitas kredibilitas, motivated reasoning, serta perhatian pada isyarat akurasi.

Pembedaan antara awareness dan acceptance memiliki implikasi penting bagi interpretasi survei opini publik. Dalam banyak perdebatan politik, tingginya tingkat pengenalan suatu isu sering diperlakukan sebagai indikasi bahwa isu tersebut telah diterima atau dipercaya publik. Padahal, paparan informasi dan penerimaan informasi merupakan dua tahapan yang berbeda dalam proses pembentukan opini. Untuk menangkap kemungkinan divergensi tersebut, studi ini menggunakan awareness–acceptance gap (AAG) sebagai perangkat analitis deskriptif yang mengukur jarak antara visibilitas suatu isu dan tingkat penerimaan terhadap isu tersebut. Dengan demikian, AAG tidak dimaksudkan sebagai konstruk psikologis baru, melainkan sebagai alat untuk mengidentifikasi sejauh mana paparan informasi benar-benar beralih menjadi endorsement dalam konteks survei opini publik.

Studi ini bertujuan menguji apakah awareness isu beralih menjadi acceptance, serta memetakan pada isu dan segmen mana divergensi keduanya paling besar dalam konteks kontroversi politik dan isu tata kelola. Untuk itu, studi ini mengoperasionalkan awareness–acceptance gap (AAG) sebagai indikator deskriptif “paparan tanpa keyakinan”, yakni selisih (poin persentase) antara proporsi responden yang melaporkan awareness atas suatu isu/klaim dan proporsi yang menyatakan acceptance terhadap isu tersebut. Analisis dipandu pertanyaan deskriptif: seberapa besar AAG lintas isu, bagaimana variasinya lintas segmen politik–demografis–akses media, serta bagaimana penerimaan berko-variasi dengan indikator kepercayaan institusional dan jalur informasi yang tersedia pada rilis.

Metode Penelitian ini merupakan analisis sekunder atas rilis survei opini publik nasional, menggunakan topline dan crosstab sebagai sumber data sehingga analisis bersifat deskriptif yang dipandu oleh kerangka teoretis tanpa mengestimasi efek kausal pada level individu. Analisis sekunder atas keluaran survei menuntut transparansi mengenai informasi yang tersedia dan yang tidak tersedia dalam rilis publik, termasuk pembatasan klaim dan risiko inferensi ekologis ketika pola segmen ditafsirkan melampaui level tabulasi (Diatta & Berchtold, 2022; Sturgis & Luff, 2021).

Basis empiris adalah rilis survei Indikator Politik Indonesia bertanggal 27 Mei 2025 (wawancara telepon 17–20 Mei 2025; N=1.286). Awareness dioperasionalkan sebagai persentase responden yang melaporkan mengetahui isu, sedangkan acceptance menggunakan item evaluatif yang dipasangkan pada isu dalam rilis (misalnya *belief*, *agreement*, atau evaluasi seperti *confidence* dan

satisfaction). AAG dihitung sebagai *Awareness (%)* dikurangi *Acceptance (%)* pada tingkat isu dan pada tingkat segmen yang tersedia dalam crosstab. Karena studi ini berbasis tabulasi agregat, keterbatasan utamanya adalah ketidakmampuan mengestimasi model multivariat dan ukuran ketidakpastian tanpa mikrodata, sehingga temuan diposisikan sebagai pemetaan ko-variasi deskriptif yang dapat memandu interpretasi dan agenda riset lanjutan.

Pembahasan

Bagian ini menafsirkan temuan dengan membedakan secara tegas antara paparan (*awareness*) dan penerimaan (*acceptance*) sebagai dua tahap yang berbeda dalam pembentukan opini publik, sehingga visibilitas isu tidak otomatis dibaca sebagai persuasi. Melalui pemetaan *awareness–acceptance gap* (AAG), pembahasan pertama-tama menunjukkan pola isu-level dan klasifikasi divergensi *awareness–acceptance*, lalu melacak variasinya menurut segmen demografis, basis politik, dan akses media sebagaimana tersedia dalam tabulasi rilis survei. Karena *acceptance* diukur melalui item evaluatif yang berbeda antar isu (misalnya *belief*, *confidence*, *satisfaction*, atau *agreement*), interpretasi difokuskan pada pola keselarasan dan konsentrasi *endorsement*, bukan pada klaim kausal atau perbandingan lintas isu sebagai satu skala tunggal (Indikator Politik Indonesia, 2025).

Awareness dan acceptance tidak bergerak searah lintas isu

Lingkungan informasi kontemporer membuat isu politik mudah mencapai visibilitas tinggi, tetapi visibilitas tidak otomatis menjadi penerimaan. Pola ini selaras dengan literatur yang menempatkan misinformasi sebagai problem ekosistem—insentif platform, amplifikasi algoritmik, dan kompetisi politik—yang dapat memengaruhi trust dan penilaian kewargaan (Lazer et al., 2018). Dalam konteks Indonesia, segmentasi jejaring dan “*algorithmic enclaves*” juga dapat membuat paparan isu luas, namun interpretasi dan penerimaan tetap terfragmentasi (Lim, 2017). Karena itu, analisis ini memisahkan *awareness* (pernah mendengar isu) dari *acceptance* (respons evaluatif yang dipasangkan dengan isu dalam rilis survei) agar “ramai” tidak dibaca sebagai “meyakinkan”.

Tabel 1. *Awareness, acceptance, dan AAG menurut isu*

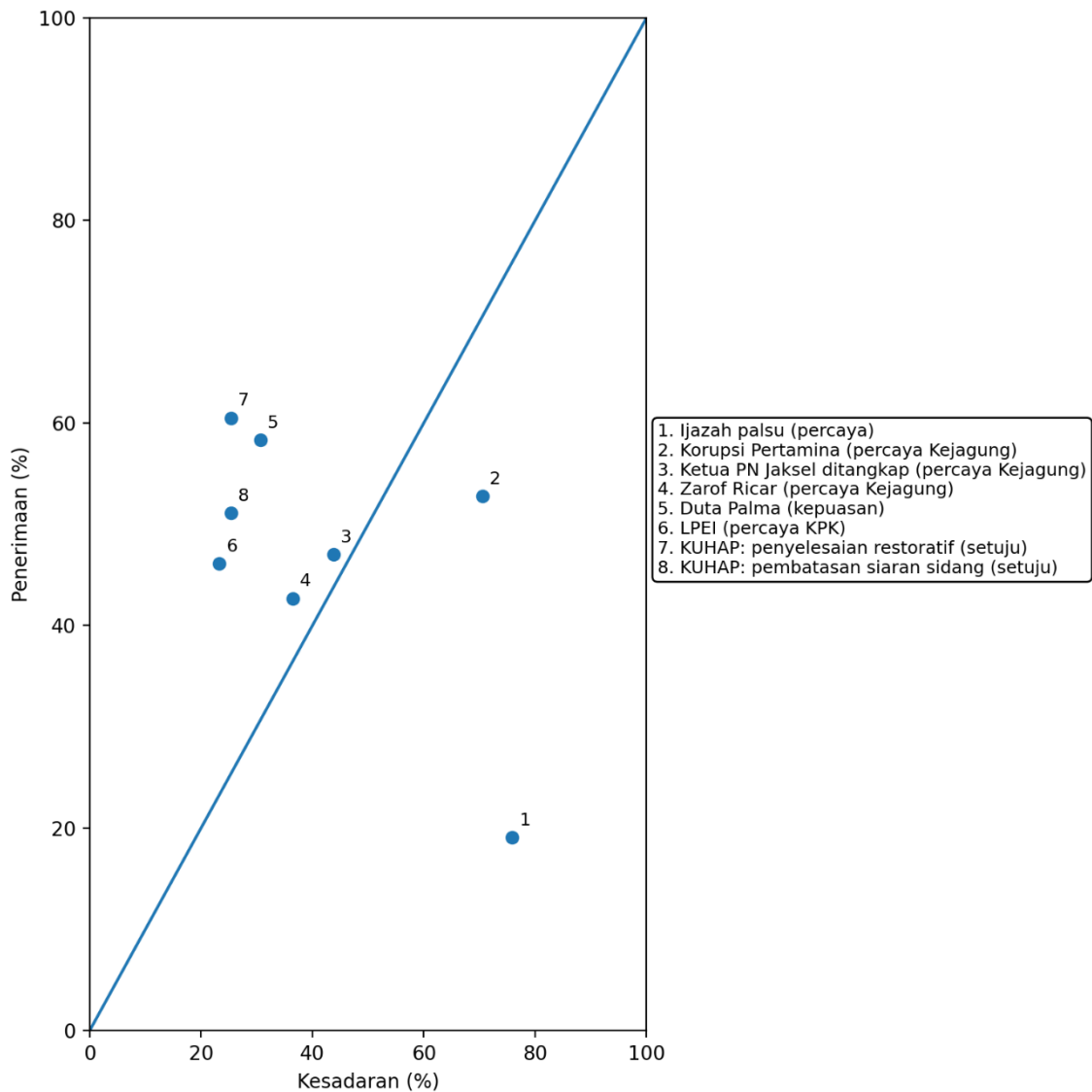
Isu (item Indikator)	Kesadaran (%)	Penerimaan (%)	AAG (poin)
Dugaan ijazah palsu (percaya dugaan itu benar)	75,9	19,1	56,8
Kasus korupsi Pertamina (keyakinan Kejaksaan Agung mampu menuntaskan)	70,5	52,8	17,7
Penangkapan Ketua PN Jakarta	43,8	47,0	-3,2

Selatan (keyakinan Kejaksaan Agung mampu menuntaskan)			
Dugaan suap mantan pejabat MA Zarof Ricar (keyakinan Kejaksaan Agung mampu menuntaskan)	36,5	42,7	-6,2
Korupsi dan TPPU Duta Palma (kepuasan atas kinerja Kejaksaan Agung)*	30,7	58,3	-27,6
Kasus korupsi LPEI (keyakinan KPK mampu menuntaskan)	23,3	46,1	-22,8
Perdebatan revisi KUHAP (item kesadaran) dipasangkan dengan: usulan penyelesaian restoratif (setuju)**	25,4	60,5	-35,1

Sumber: Kompilasi dan perhitungan penulis dari rilis survei telepon nasional Indikator Politik Indonesia (17–20 Mei 2025; n=1.286).

Catatan: AAG = *Awareness – Acceptance* (poin persentase).

Tabel 1 dan Gambar 1 menunjukkan bahwa *awareness* dan *acceptance* tidak bergerak “*lockstep*” lintas isu. Dua hal penting perlu ditegaskan sejak awal agar pembacaan hasil tidak melampaui data. Pertama, pada rilis Indikator, *acceptance* bukan satu konstruk laten tunggal. *Acceptance* ditentukan oleh item pasangan yang berbeda-beda: *belief* pada tuduhan (ijazah palsu), *confidence* penegak hukum (kasus korupsi tertentu), *satisfaction* kinerja institusi (Duta Palma), dan *agreement* atas ketentuan kebijakan (KUHAP) (Indikator Politik Indonesia, 2025). Karena target *acceptance* berbeda, AAG diperlakukan sebagai statistik keselarasan isu-level untuk klasifikasi pola (apakah *awareness* beriring dengan *belief/confidence/satisfaction/agreement*), bukan sebagai skala persuasi lintas isu yang sepenuhnya sebanding.



Gambar 1. *Scatter awareness vs acceptance* lintas isu

Sumber: Visualisasi penulis berdasarkan rilis Indikator Politik Indonesia (17–20 Mei 2025; n=1.286).

Catatan: Garis 45° menandai *awareness = acceptance*; titik di bawah garis = AAG positif; titik di atas garis = AAG negatif.

Kedua, karena acceptance tidak homogen, interpretasi utama “paparan tanpa keyakinan” paling tepat untuk isu yang *acceptance*-nya berupa belief endorsement atas klaim faktual yang diperdebatkan. Untuk isu kebijakan dan evaluasi kinerja, AAG negatif lebih tepat dibaca sebagai ekspresi sikap normatif/institusional yang tidak selalu menuntut responden mengenali label isu spesifik. Pembedaan ini menjaga interpretasi tetap sah dan konsisten dengan kehati-hatian analitis ketika data yang digunakan adalah tabulasi agregat rilis publik.

Tuduhan Ijazah Palsu: Paparan Tinggi, Keyakinan Rendah

Kasus tuduhan ijazah palsu menonjol sebagai konfigurasi “*high exposure/low acceptance*” paling ekstrem: *awareness* 75,9% sementara *belief* 19,1%, menghasilkan AAG positif 56,8 poin (Indikator Politik Indonesia, 2025). Secara deskriptif, pola ini mengindikasikan jarak yang besar antara visibilitas isu dan endorsement keyakinan. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa difusi/atensi tidak sama dengan persuasi; bahkan ketika klaim beredar luas, publik tidak otomatis mengonversinya menjadi *belief* mayoritas (Allcott & Gentzkow, 2017). Bukti ekosistem juga menunjukkan bahwa konsumsi berita hanya sebagian dari konsumsi media, dan paparan “*fake news*” rata-rata merupakan bagian kecil dari total konsumsi, sehingga asumsi “miskonsepsi massal” perlu dikalibrasi (Allen et al., 2020).

Pola “dikenal luas tetapi dipercaya minoritas” juga konsisten dengan temuan bahwa penyebaran konten keliru dapat sangat cepat dan luas dalam kondisi tertentu, namun itu tidak mengharuskan penerimaan publik menjadi merata (Vosoughi et al., 2018). Selain itu, literatur konsentrasi audiens menunjukkan bahwa *exposure* dan *sharing* sumber misinformasi dapat terpusat pada sebagian kecil pengguna (Grinberg et al., 2019). Pola serupa juga terlihat pada kunjungan ke situs yang dinilai tidak tepercaya yang tidak universal dan berpola menurut preferensi politik serta jalur platform (A. M. Guess, Nyhan, et al., 2020). Dengan kata lain, AAG besar pada isu ijazah palsu kompatibel dengan konfigurasi “beredar luas, tetapi *belief* terkonsentrasi”.

Pembacaan ini juga konsisten dengan penelitian yang menekankan bahwa sirkulasi dan *belief* dapat berpisah. Headline *veracity* sering berpengaruh lebih kuat pada penilaian akurasi dibanding niat berbagi, sehingga “beredar” tidak identik dengan “dipercaya” (Pennycook et al., 2021). Sejalan dengan itu, kerentanan terhadap headline palsu sering lebih terkait kurangnya keterlibatan analitis dan perhatian pada akurasi dibanding bias partisan murni (Pennycook dan Rand, 2018). Di saat yang sama, repetisi dapat menaikkan *perceived accuracy* bagi sebagian orang (*illusory truth*), namun *belief* tetap bergantung pada konteks dan perbedaan individu (Pennycook et al., 2018). Dalam kerangka ini, AAG besar bukan anomali, melainkan sinyal bahwa *awareness* tinggi tidak cukup untuk menumbuhkan *endorsement* yang luas.

Isu korupsi-penegakan hukum menunjukkan pola “*confidence* yang lebih stabil” dibanding *awareness*

Untuk item korupsi/penegakan hukum, Tabel 1 memperlihatkan *awareness* yang bervariasi antar kasus (misalnya tinggi pada Pertamina, lebih rendah pada LPEI), sementara *acceptance* yang diukur sebagai *confidence* cenderung berada pada rentang yang lebih sempit pada seri “*all respondents*” yang dilaporkan (Indikator Politik Indonesia, 2025). Ini menghasilkan AAG positif moderat pada kasus tertentu (Pertamina), tetapi AAG negatif kecil pada kasus lain. Perbedaan ini masuk akal karena *acceptance* di sini bukan *belief* pada klaim faktual, melainkan evaluasi kapasitas institusi (KPK/Kejaksaan). Responden dapat mengekspresikan *confidence* institusional umum walau tidak melaporkan *awareness* terhadap label kasus tertentu.

Kasus Duta Palma semakin menegaskan perbedaan jenis *acceptance*. Pada Duta Palma, *acceptance* dioperasionalkan sebagai *satisfaction* atas kinerja Kejaksaan, bukan *confidence* kemampuan investigasi; di sini *satisfaction* (58,3%) melampaui *awareness* (30,7%) sehingga AAG negatif (Indikator Politik Indonesia, 2025). AAG negatif seperti ini tidak perlu dibaca sebagai “menerima tanpa informasi” secara literal. Ia lebih tepat dipahami sebagai kondisi pengukuran survei: pengakuan *awareness* atas label isu menuntut recall spesifik, sedangkan item evaluatif menuntut sikap yang bisa ditopang oleh *trust* umum, penilaian institusi, atau preferensi kebijakan.

Gap negatif terbesar terkonsentrasi pada kebijakan KUHAP dan evaluasi kinerja institusi

KUHAP memperlihatkan pola “*low awareness/high acceptance*” paling jelas: hanya 25,4% mengaku *aware* adanya pembahasan revisi KUHAP, tetapi mayoritas setuju pada ketentuan kebijakan tertentu (*restorative resolution* 60,5%; pembatasan siaran langsung sidang 51,1%) sehingga AAG menjadi negatif besar (Indikator Politik Indonesia, 2025). Secara substantif, ini menunjukkan bahwa dukungan pada ketentuan kebijakan bisa muncul tanpa pengenalan label isu, karena responden merespons isi kebijakan sebagai posisi normatif. Pola ini penting karena menjelaskan mengapa sebagian titik berada di atas diagonal pada Gambar 1: *acceptance* di beberapa isu lebih dekat ke orientasi normatif/institusional daripada *belief* pada klaim faktual.

Temuan ini membantu memusatkan fokus analitis artikel: konfigurasi “paparan tanpa keyakinan” yang paling teoritis untuk literatur misinformasi terdapat pada isu yang *acceptance*-nya berupa *belief endorsement* atas klaim yang diperdebatkan. Itu sebabnya analisis heterogenitas segmen dan kanal paling informatif ketika dikunci pada tuduhan ijazah palsu (Pennycook et al., 2018; Pennycook & Rand, 2018).

Divergensi absolut mengidentifikasi mismatch yang paling politis signifikan

Tabel 2. Isu dengan divergensi *awareness–acceptance* terbesar (*absolute AAG*)

Peringkat	Isu	Kesadaran (%)	Penerimaan (%)	AAK (poin)	AAK Absolut
1	Dugaan ijazah palsu (percaya dugaan itu benar)	75,9	19,1	56,8	56,8
2	KUHAP: usulan penyelesaian restoratif (setuju)	25,4	60,5	-35,1	35,1
3	Kasus Duta Palma (kepuasan)	30,7	58,3	-27,6	27,6

	atas kinerja Kejaksanaan Agung)				
4	KUHAP: pembatasan siaran langsung persidangan (setuju)	25,4	51,1	-25,7	25,7
5	Kasus LPEI (keyakinan KPK mampu menuntaskan)	23,3	46,1	-22,8	22,8

Sumber: Kompilasi dan perhitungan penulis dari rilis Indikator Politik Indonesia (17–20 Mei 2025; n=1.286).

Catatan: Absolute AAG mengurut besaran *mismatch*; tanda (+/-) menunjukkan arah *mismatch*.

Tabel 2 menegaskan bahwa *mismatch* terbesar terbagi menjadi dua kelas: (1) *mismatch* positif besar pada isu ijazah palsu (paparan tinggi, *belief* rendah) dan (2) *mismatch* negatif besar pada KUHAP dan kepuasan kinerja (*acceptance* lebih tinggi daripada *awareness*). Secara konseptual, pemetaan ini membantu membedakan dua tantangan pemerintahan: klaim faktual yang populer tetapi tidak dipercaya mayoritas, versus dukungan kebijakan/evaluasi institusi yang tidak bergantung pada *awareness* label isu. Pada kategori pertama, kekhawatiran literatur misinformasi biasanya bukan “semua orang percaya”, melainkan bahwa *belief* terkonsentrasi pada segmen tertentu dan dapat menimbulkan distorsi politik meski tidak menjadi mayoritas (Adams et al., 2023; Pennycook & Rand, 2021). Karena itu, Tabel 2 memberikan dasar deskriptif yang kuat untuk mengatakan: perhatian publik tidak dapat dipakai sebagai ukuran dampak persuasi.

Agar interpretasi tetap disiplin, temuan pada bagian isu-level ini ditempatkan sebagai pola deskriptif dari tabulasi rilis. Literatur dipakai untuk menafsirkan plausibilitas mekanisme, bukan untuk mengklaim bahwa mekanisme tertentu telah terbukti oleh data agregat. Pembatasan klaim ini konsisten dengan kehati-hatian terhadap inferensi ekologis (Gnaldi et al., 2018) dan praktik analisis sekunder ketika informasi desain, varians, dan mikrodata tidak tersedia (Diatta & Berchtold, 2022; Sturgis & Luff, 2021).

Keyakinan lebih terkonsentrasi secara politik dibanding *awareness*

Tabel 3. *Awareness*, *belief*, dan AAG menurut segmen—tuduhan ijazah palsu

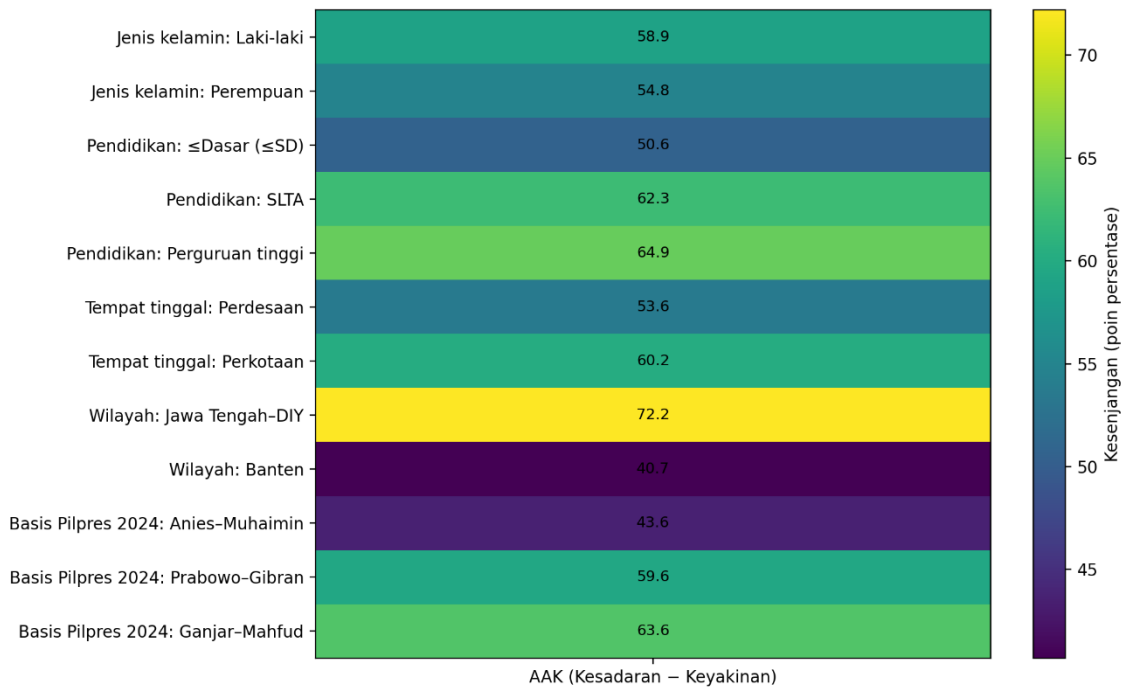
Segmen	Kesadaran (%)	Keyakinan Penerimaan (%)	AAK (poin)
Jenis kelamin: Laki-laki	83,0	24,1	58,9
Jenis kelamin: Perempuan	68,9	14,1	54,8
Pendidikan: ≤Dasar (≤SD)	71,1	20,5	50,6

Pendidikan: SLTA	80,1	17,8	62,3
Pendidikan: Perguruan tinggi	81,8	16,9	64,9
Tempat tinggal: Perdesaan	71,2	17,6	53,6
Tempat tinggal: Perkotaan	80,8	20,6	60,2
Wilayah: Jawa Tengah-DIY	85,1	12,9	72,2
Wilayah: Banten	69,8	29,1	40,7
Basis Pilpres 2024: Anies-Muhaimin	83,8	40,2	43,6
Basis Pilpres 2024: Prabowo-Gibran	74,8	15,2	59,6
Basis Pilpres 2024: Ganjar-Mahfud	84,2	20,6	63,6

Sumber: Kompilasi dan perhitungan penulis dari tabulasi segmen rilis Indikator Politik Indonesia (17–20 Mei 2025; n=1.286).

Catatan: *Belief* = “sangat percaya + percaya”; AAG = *Awareness – Belief*.

Pada level segmen, struktur dasarnya tetap: *awareness* tinggi hampir di semua kelompok, sedangkan *belief* jauh lebih rendah, sehingga AAG positif besar menjadi pola umum (Indikator Politik Indonesia, 2025). Namun, variasi *belief* menunjukkan konsentrasi politik yang jelas: basis Anies–Muhaimin melaporkan *belief* lebih tinggi dibanding basis Prabowo–Gibran dan Ganjar–Mahfud, sehingga AAG basis Anies lebih kecil meski *awareness* tetap tinggi (Indikator Politik Indonesia, 2025). Ini menunjukkan bahwa perbedaan utama lintas kelompok bukan pada “siapa yang tahu”, melainkan pada “siapa yang menerima”. Pola konsentrasi ini paralel dengan temuan di konteks lain bahwa *engagement* terhadap sumber berkualitas rendah dan penerimaan informasi bermasalah sering tidak merata dan terkonsentrasi pada komunitas tertentu (Grinberg et al., 2019; A. Guess et al., 2019; A. M. Guess, Lerner, et al., 2020).



Gambar 2. Heatmap AAG menurut segmen—tuduhan ijazah palsu.
 Sumber: Visualisasi penulis berdasarkan tabulasi segmen rilis Indikator Politik Indonesia (17–20 Mei 2025; n=1.286).

Secara teori, pola konsentrasi belief ini konsisten dengan penjelasan yang diajukan dalam literatur identity-based processing dan motivated reasoning. Namun, karena penelitian ini menggunakan tabulasi agregat, mekanisme tersebut tidak dapat diuji secara langsung dan hanya digunakan sebagai kerangka interpretasi yang mungkin menjelaskan pola yang teramati. Identitas politik dapat membentuk atensi dan evaluasi terhadap klaim yang relevan secara identitas (Bavel & Pereira, 2018). Tradisi *motivated reasoning* menekankan penggunaan penalaran untuk tujuan *directional*—mempertahankan identitas/sikap—bukan semata tujuan akurasi (Kunda, 1990; Lodge & Taber, 2013; Lord et al., 1979; Taber & Lodge, 2006). Namun, jalur lain yang juga relevan adalah perbedaan perhatian pada akurasi dan keterlibatan analitis: kerentanan terhadap *headline* palsu sering lebih terkait “*attention-to-accuracy gap*” daripada bias partisan murni (Pennycook & Rand, 2018). Rilis tabulasi tidak memungkinkan pengujian mekanisme; yang dapat diklaim secara ketat adalah adanya ko-variasi *belief* dengan basis politik meski *awareness* tinggi.

Perbedaan kanal informasi menampilkan lingkungan “aware tapi skeptis” versus “aware dan lebih menerima”

Tabel 4. *Awareness, belief, dan AAG menurut akses media—tuduhan ijazah palsu*

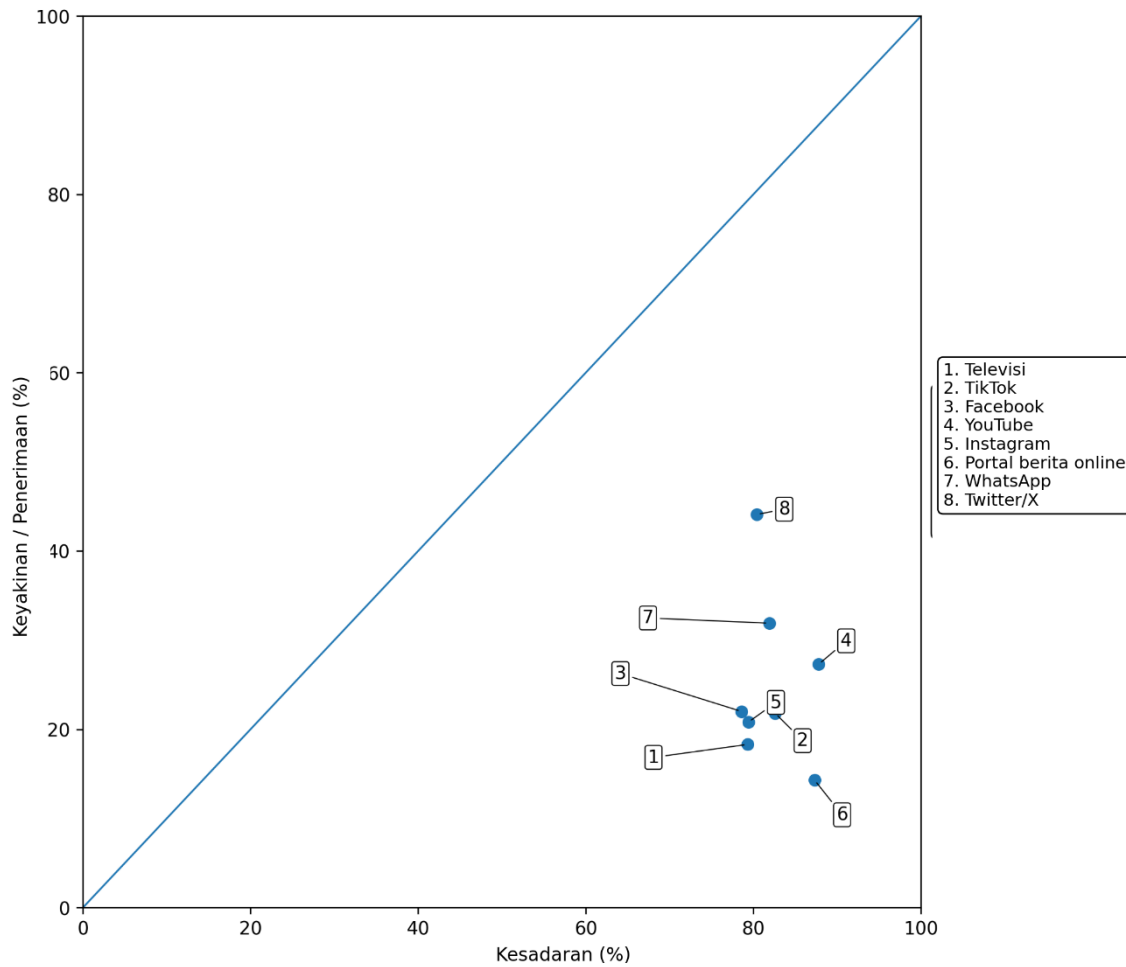
Akses media (bulan terakhir)	Basis (%)	Kesadaran (%)	Keyakinan (%)	AAK
Televisi	48,2	79,3	18,3	61,0
TikTok	32,7	82,6	21,8	60,8
Facebook	31,3	78,6	22,0	56,6

YouTube	26,1	87,8	27,3	60,5
Instagram	21,9	79,4	20,8	58,6
Portal berita online	16,3	87,3	14,3	73,0
WhatsApp	8,1	81,9	31,9	50,0
Twitter/X	6,1	80,4	44,1	36,3

Sumber: Kompilasi dan perhitungan penulis dari tabulasi akses media rilis Indikator Politik Indonesia (17–20 Mei 2025; n=1.286).

Catatan: Kategori akses media tidak saling eksklusif.

Tabulasi akses media memperlihatkan dispersi: beberapa sumber berjangkauan besar menunjukkan *awareness* tinggi tetapi *belief* rendah (AAG besar), sedangkan Twitter/X dan WhatsApp memperlihatkan *belief* lebih tinggi sehingga AAG lebih kecil (Indikator Politik Indonesia, 2025). Karena kategori akses media tidak *mutually exclusive*, interpretasi yang sah adalah “pola lingkungan informasi”, bukan efek kausal platform. Pola lintas kanal ini konsisten dengan bukti bahwa penyebaran konten keliru dapat berbeda lintas kanal dan sering terkonsentrasi (Allen et al., 2020; Vosoughi et al., 2018). Ia juga kompatibel dengan temuan bahwa akurasi *headline* lebih kuat memengaruhi penilaian akurasi dibanding niat berbagi, sehingga sirkulasi dan *belief* dapat terpisah (Pennycook et al., 2021) Penjelasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bukti bahwa mekanisme tertentu bekerja dalam data ini, melainkan sebagai kemungkinan interpretasi yang konsisten dengan literatur mengenai evaluasi informasi politik dan misinformasi.



Gambar 3. *Awareness versus belief* menurut akses media—tuduhan ijazah palsu. Sumber: Visualisasi penulis berdasarkan rilis Indikator Politik Indonesia (17–20 Mei 2025; n=1.286).

Penafsiran lintas kanal juga perlu mempertimbangkan sinyal kredibilitas dan proses koreksi. Upaya yang menekankan pentingnya pengecekan akurasi sebelum membagikan konten dapat mengurangi penyebaran informasi keliru tanpa menuntut perubahan besar pada paparan. Artinya, variasi lintas kanal dapat muncul karena perbedaan norma verifikasi, rujukan sumber, dan isyarat kredibilitas yang tersedia bagi pengguna, sehingga perbedaan lingkungan informasi dapat bekerja melalui kebiasaan evaluasi dan *cue* kontekstual (Pennycook et al., 2021). Di sisi lain, label peringatan parsial dapat memicu *“implied truth”* pada konten tanpa label, yang relevan untuk menjelaskan mengapa *awareness* tinggi tidak selalu berujung *belief* tinggi (Pennycook et al., 2020). Bukti tentang timing koreksi juga menunjukkan bahwa koreksi yang datang pada waktu tertentu dapat memengaruhi penilaian berikutnya, sehingga lingkungan kaya koreksi dapat menahan *belief* meski *awareness* tinggi (Brashier et al., 2021). Karena *belief* sering berkelindan dengan *trust* dan praktik verifikasi, literatur tentang *trust* institusi juga relevan sebagai kerangka interpretasi lintas konteks (Vinck et al., 2019; Zoonen et al., 2024). Sekali lagi, rilis tabulasi tidak cukup untuk menguji mediasi; klaim yang aman adalah bahwa *belief* berbeda antar kelompok akses media meski *awareness* konsisten tinggi.

Sintesis mekanisme: proses dua tahap dan selective skepticism

Gabungan pola isu-level, segmen politik, dan akses media dapat dibaca melalui kerangka proses dua tahap. Dalam literatur, *awareness* sering dikaitkan dengan saliens isu dan dinamika agenda, sedangkan *acceptance* sering dijelaskan melalui proses evaluatif seperti kredibilitas, kepercayaan, dan pemrosesan berbasis identitas. Namun, karena penelitian ini menggunakan tabulasi agregat, hubungan tersebut diposisikan sebagai kerangka interpretatif dan bukan sebagai mekanisme yang diuji secara langsung. Sintesis ini menolak asumsi “lebih banyak paparan → lebih banyak *belief*”, dan lebih cocok dengan argumen bahwa dampak misinformasi sering heterogen dan lebih terbatas dari asumsi publik (Adams et al., 2023; Pennycook & Rand, 2021). Dalam kerangka ini, publik tidak *uniform gullible*; banyak yang mengenali klaim tanpa menerima, sementara *belief* terkonsentrasi pada subset tertentu.

Kerangka koreksi dan persistensi juga membantu menafsirkan koeksistensi *awareness* tinggi dengan *belief* rendah. Meta-analisis menunjukkan koreksi/*fact-check* rata-rata menurunkan *misperceptions*, tetapi *continued influence* dapat bertahan karena klaim awal lebih “*sticky*” atau terintegrasi dalam narasi koheren (Chan et al., 2017; Walter & Tukachinsky, 2019). Walau studi ini bukan eksperimen koreksi, pola *awareness* tinggi–*belief* rendah kompatibel dengan lingkungan di mana bantahan elite, koreksi *peer*, atau jurnalisme dapat membatasi adopsi *belief* bagi banyak warga. Penelitian eksperimental juga menunjukkan koreksi pengguna di media sosial dapat mengurangi *misperceptions* (Bode & Vraga, 2017). Di sisi lain, bukti *backfire* yang kuat tidak konsisten secara umum; banyak eksperimen besar menemukan koreksi tidak secara sistematis meningkatkan *miskonsepsi* (Wood & Porter, 2019). Ini membuat AAG besar bukan paradoks, melainkan konfigurasi yang mungkin terjadi dalam ruang publik yang kontestatif.

Selain dampak melalui *belief*, penting juga mempertimbangkan jalur *harm* melalui ketidakpastian dan erosi *trust*. Paparan terhadap media sintesis dapat meningkatkan ketidakpastian dan menurunkan *trust* terhadap berita di media sosial meski tanpa *deception* massal, menunjukkan bahwa *misinformasi* bisa merusak melalui erosi epistemik, bukan semata *belief* (Vaccari & Chadwick, 2020). Perspektif ini konsisten dengan peringatan konseptual bahwa dampak *misinformasi* tidak seharusnya direduksi ke satu metrik *belief* saja (Adams et al., 2023) Penting ditekankan bahwa seluruh pembahasan mekanisme pada bagian ini bersifat *theory-informed* dan tidak merupakan pengujian empiris langsung. Data yang digunakan hanya memungkinkan identifikasi pola ko-variasi deskriptif, sehingga literatur digunakan untuk membantu menafsirkan plausibilitas hubungan yang diamati, bukan untuk menetapkan hubungan kausal maupun mekanisme psikologis tertentu.

Implikasi: komunikasi publik, literasi evaluatif, dan targeting yang peka polarisasi

Implikasi kebijakan yang paling langsung adalah memisahkan visibilitas dari persuasi. Pada beberapa klaim, *awareness* sudah tinggi, tetapi *belief* tetap minoritas dan terkonsentrasi. Karena itu, strategi komunikasi publik yang hanya meningkatkan

awareness berpotensi menghasilkan manfaat yang semakin menurun. Koreksi dan klarifikasi tetap penting, tetapi harus memperhatikan desain pesan agar tidak memperkuat familiaritas klaim; literatur menunjukkan koreksi efektif rata-rata, namun bersyarat dan tidak menghapus seluruh pengaruh (Chan et al., 2017; Pennycook et al., 2018; Walter et al., 2019; Walter & Tukachinsky, 2019). Ini mengarah pada kebutuhan “arsitektur respons” yang cepat, berbasis sumber kredibel, dan fokus pada koherensi narasi korektif.

hasil ini mengindikasikan bahwa intervensi yang menekankan kebiasaan evaluatif mungkin lebih relevan dibanding pendekatan yang hanya berfokus pada peningkatan *awareness* (Pennycook & Rand, 2021). Pendekatan inokulasi/*prebunking* yang melatih publik mengenali teknik manipulasi didukung bukti eksperimental dan relevan untuk klaim yang berubah cepat (Basol et al., 2020; Roozenbeek & Linden, 2019). Karena *belief* terkonsentrasi, intervensi juga lebih efisien bila diarahkan pada segmen dan kanal dengan *belief* lebih tinggi, namun desainnya harus peka terhadap polarisasi dan isyarat identitas (Bavel & Pereira, 2018; Taber & Lodge, 2006). Pada level sistemik, ketahanan terhadap disinformasi dipengaruhi kondisi seperti struktur media, polarisasi, dan ekologi *trust*, sehingga penguatan transparansi dan akuntabilitas institusi menjadi bagian dari strategi resiliensi (Humprecht et al., 2020; Mari et al., 2022; Sutton & Douglas, 2020).

Keterbatasan: tabulasi agregat, heterogenitas acceptance, dan pengukuran paparan

Keterbatasan utama studi ini adalah ketergantungan pada tabulasi agregat rilis publik. Tanpa *mikrodata*, analisis tidak dapat mengestimasi model multivariat, menghitung ukuran ketidakpastian, atau menguji mediasi (misalnya peran *trust* sebagai perantara). Karena itu, seluruh interpretasi mekanisme ditempatkan sebagai penjelasan yang konsisten dengan literatur, bukan bukti kausal. Risiko inferensi ekologis perlu dinyatakan karena unit analisis adalah segmen, bukan individu (Gnaldi et al., 2018). Prinsip transparansi ini sejalan dengan pedoman analisis sekunder keluaran survei ketika elemen informasi kunci tidak tersedia (Diatta & Berchtold, 2022; Sturgis & Luff, 2021).

Keterbatasan kedua adalah heterogenitas *acceptance* antar isu (*belief*, *confidence*, *satisfaction*, *agreement*). Ini membuat perbandingan lintas isu harus dibaca sebagai “endorsement atas item evaluatif yang dipasangkan”, bukan satu konstruk *acceptance* yang seragam. Ketiga, *awareness* merupakan proksi paparan berbasis *self-report* dan berbeda dari *exposure* berbasis *trace*; pengukuran *exposure* juga menghadapi bias *ephemerality* dan aksesibilitas konten, sehingga perbedaan strategi pengukuran dapat menghasilkan gambaran yang berbeda (Dahlke et al., 2023). Keempat, isu *nonresponse* dan representativitas idealnya dibahas sebagai batasan karena diagnosis propensitas respons biasanya memerlukan mikrodata dan variabel bantu (Bethlehem, 2020; Struminskaya & Gummer, 2022).

Penutup

Artikel ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran (*awareness*) terhadap suatu isu tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat penerimaan (*acceptance*) publik. Melalui analisis terhadap rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia, penelitian

ini menemukan bahwa hubungan antara paparan informasi dan penerimaan publik bersifat bervariasi lintas isu, segmen politik, karakteristik demografis, dan akses media. Temuan paling menonjol terlihat pada isu dugaan ijazah palsu yang memiliki tingkat awareness sangat tinggi tetapi tingkat belief yang relatif rendah, sehingga menghasilkan *awareness–acceptance gap* (AAG) positif yang besar. Sebaliknya, pada sejumlah isu kebijakan dan evaluasi institusi, tingkat acceptance justru melampaui awareness, menunjukkan bahwa penerimaan publik tidak selalu bergantung pada pengenalan terhadap label isu tertentu.

Temuan tersebut memberikan kontribusi empiris terhadap studi opini publik dan komunikasi politik di Indonesia dengan menunjukkan bahwa visibilitas suatu isu tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai indikator keberhasilan persuasi atau penerimaan publik. Dalam banyak kasus, isu dapat menjadi pengetahuan bersama tanpa memperoleh endorsement yang luas. Sebaliknya, dukungan terhadap suatu kebijakan atau institusi dapat muncul meskipun tingkat awareness terhadap isu yang melatarbelakanginya relatif rendah. Dengan demikian, perhatian publik dan penerimaan publik merupakan dua fenomena yang perlu dianalisis secara terpisah.

Pada tingkat konseptual, penelitian ini menegaskan pentingnya perbedaan antara awareness dan acceptance dalam pembentukan opini publik. Untuk tujuan tersebut, artikel ini menggunakan *awareness–acceptance gap* (AAG) sebagai perangkat analitis deskriptif untuk memetakan jarak antara visibilitas isu dan tingkat penerimaan publik. AAG tidak dimaksudkan sebagai konstruk psikologis baru ataupun ukuran kausal, melainkan sebagai alat analitis yang sederhana, transparan, dan mudah direplikasi untuk membaca *topline* maupun *crostab* survei ketika mikrodata tidak tersedia. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih sistematis terhadap lokasi-lokasi divergensi antara paparan informasi dan penerimaan publik dalam perdebatan politik.

Meskipun demikian, temuan penelitian ini perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Analisis dilakukan berdasarkan tabulasi agregat sehingga tidak memungkinkan pengujian hubungan multivariat, inferensi kausal, maupun identifikasi mekanisme psikologis yang menjelaskan peralihan dari awareness menuju acceptance. Selain itu, acceptance dalam penelitian ini diukur melalui berbagai bentuk respons evaluatif yang berbeda, seperti *belief*, *confidence*, *satisfaction*, dan *agreement*, sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan satu konstruk yang seragam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memanfaatkan mikrodata survei, desain longitudinal, maupun pendekatan eksperimental untuk menguji secara lebih mendalam bagaimana identitas politik, kepercayaan institusional, praktik verifikasi informasi, dan lingkungan media membentuk hubungan antara paparan informasi dan penerimaan publik dalam konteks politik Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para kolega yang telah memberikan masukan dan kritik konstruktif selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Indikator Politik Indonesia atas publikasi rilis survei

telepon nasional yang memungkinkan analisis sekunder dan pemetaan temuan dalam artikel ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Adams, Z., Osman, M., Bechlivanidis, C., & Meder, B. (2023). (Why) Is Misinformation a Problem? *Perspectives on Psychological Science*, 18(6), 1436–1463. <https://doi.org/10.1177/17456916221141344>
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Allen, J., Howland, B., Mobius, M., Rothschild, D., & Watts, D. J. (2020). Evaluating the fake news problem at the scale of the information ecosystem. *Science Advances*, 6(14). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aay3539>
- Basol, M., Roozenbeek, J., & Linden, S. van der. (2020). Good News about Bad News: Gamified Inoculation Boosts Confidence and Cognitive Immunity Against Fake News. *Journal of Cognition*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.5334/joc.91>
- Bavel, J. J. Van, & Pereira, A. (2018). The Partisan Brain: An Identity-Based Model of Political Belief. *Trends in Cognitive Sciences*, 22(3), 213–224. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.01.004>
- Bethlehem, J. (2020). Working with Response Probabilities. *Journal of Official Statistics*, 36(3), 647–674. <https://doi.org/10.2478/JOS-2020-033>
- Bode, L., & Vraga, E. K. (2017). See Something, Say Something: Correction of Global Health Misinformation on Social Media. *Health Communication*, 33(9), 1131–1140. <https://doi.org/10.1080/10410236.2017.1331312>
- Brashier, N. M., Pennycook, G., Berinsky, A. J., & Rand, D. G. (2021). Timing matters when correcting fake news. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(5). <https://doi.org/10.1073/pnas.2020043118>
- Chan, M. S., Jones, C. R., Jamieson, K. H., & Albarracín, D. (2017). Debunking: A Meta-Analysis of the Psychological Efficacy of Messages Countering Misinformation. *Psychological Science*, 28(11), 1531–1546. <https://doi.org/10.1177/0956797617714579>
- Dahlke, R., Kumar, D., Durumeric, Z., & Hancock, J. T. (2023). PIE Metrics: Quantifying the Systematic Bias in the Ephemerality and Inaccessibility of Web Scraping Content from URL-Logged Web-Browsing Digital Trace Data. *Social Science Computer Review*, 43(5). <https://doi.org/10.31219/osf.io/bkpqt>
- Diatta, I. D., & Berchtold, A. (2022). Impact of missing information on day-to-day research based on secondary data. *International Journal of Social Research Methodology*, 26(6), 759–772. <https://doi.org/10.1080/13645579.2022.2103983>
- Gnaldi, M., Tomaselli, V., & Forcina, A. (2018). Ecological Fallacy and Covariates: New Insights based on Multilevel Modelling of Individual Data. *International Statistical Review*, 86(1), 119–135. <https://doi.org/10.1111/insr.12244>

- Grinberg, N., Joseph, K., Friedland, L., Swire-Thompson, B., & Lazer, D. (2019). Fake news on Twitter during the 2016 U.S. presidential election. *Science*, 363(6425), 374–378. <https://doi.org/10.1126/science.aau2706>
- Guess, A. M., Lerner, M., Lyons, B., M.Montgomery, J., Nyhan, B., Reifler, J., & Sircar, N. (2020). A Digital Media Literacy Intervention Increases Discernment Between Mainstream And False News In The United States And India. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(27). <https://doi.org/10.1073/pnas.1920498117>
- Guess, A. M., Nyhan, B., & Reifler, J. (2020). Exposure to untrustworthy websites in the 2016 U.S. election. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 472–480. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0833-x>.
- Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. *Science Advances*, 5(1). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586>
- Humprecht, E., Esser, F., & Aelst, P. Van. (2020). Resilience To Online Disinformation: A Framework For Cross-National Comparative Research. *The International Journal of Press/Politics*, 25(3), 493–516. <https://doi.org/10.1177/1940161219900126>
- Indikator Politik Indonesia. (2025). *Tingkat Kepercayaan Publik atas Kinerja Lembaga Lembaga Negara dan Pemberantasan Korupsi: Temuan Survei Telepon Nasional 17–20 Mei 2025*. <https://indikator.co.id>
- Kunda, Z. (1990). The Case for Motivated Reasoning. *Psychological Bulletin*, 108(3), 480–498. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.480>
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J., & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news Addressing fake news requires a multidisciplinary effort. *Science*, 359(6380), 1094–1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Lodge, M., & Taber, C. S. (2013). *The Rationalizing Voter*. Cambridge University Press.
- Lord, C. G., Ross, L., & Lepper, M. R. (1979). Biased Assimilation and Attitude Polarization: The Effects of Prior Theories on Subsequently Considered Evidence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(11), 2098–2109. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.11.2098>
- Mari, S., Zúñiga, H. G. de, Suerdem, A., Hanke, K., Brown, G., Vilar, R., Boer, D., & Bilewicz, M. (2022). Conspiracy Theories and Institutional Trust: Examining the Role of Uncertainty Avoidance and Active Social Media Use. *Political Psychology*, 43(2). <https://doi.org/10.1111/pops.12754>
- Pennycook, G., Bear, A., Collins, E. T., & Rand, D. G. (2020). The Implied Truth Effect: Attaching Warnings to a Subset of Fake News Headlines Increases Perceived Accuracy of Headlines Without Warnings. *Management Science*, 66(11), 4944–4957. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3478>
- Pennycook, G., Cannon, T. D., & Rand, D. G. (2018). Prior exposure increases

- perceived accuracy of fake news. *Journal of Experimental Psychology: General*, 147(12), 1865–1880. <https://doi.org/10.1037/xge0000465>
- Pennycook, G., Epstein, Z., Mosleh, M., Arechar, A. A., Eckles, D., & Rand, D. G. (2021). Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online. *Nature*, 592(7855), 590–595. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03344-2>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2018). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. *Cognition*, 188, 39–50. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The Psychology of Fake News. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388–402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Roozenbeek, J., & Linden, S. van der. (2019). Fake news game confers psychological resistance against online misinformation. *Humanities and Social Sciences Communications*, 5(65). <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0279-9>
- Struminskaya, B., & Gummer, T. (2022). Risk of Nonresponse Bias and the Length of the Field Period in a Mixed-Mode General Population Panel. *Journal of Survey Statistics and Methodology*, 10(1), 161–182. <https://doi.org/10.1093/jssam/smab011>
- Sturgis, P., & Luff, R. (2021). The demise of the survey? A research note on trends in the use of survey data in the social sciences, 1939 to 2015. *International Journal of Social Research Methodology*, 24(6), 691–696. <https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1844896>
- Sutton, R. M., & Douglas, K. M. (2020). Conspiracy Theories and the Conspiracy Mindset: Implications for Political Ideology. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 34, 118–122. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2020.02.015>
- Taber, C. S., & Lodge, M. (2006). Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs. *American Journal of Political Science*, 50(3), 755–769. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00214.x>
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News. *Social Media + Society*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>
- Vinck, P., Pham, P. N., Bindu, K. K., Bedford, J., & Nilles, E. J. (2019). Institutional trust and misinformation in the response to the 2018–19 Ebola outbreak in North Kivu, DR Congo: a population-based survey. *The Lancet Infectious Diseases*, 19, 529–36. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(19\)30063-5](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30063-5)
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap955>
- Walter, N., Cohen, J., Holbert, R. L., & Morag, Y. (2019). Fact-Checking: A Meta-Analysis of What Works and for Whom. *Political Communication*, 37(3), 350–375. <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1668894>
- Walter, N., & Tukachinsky, R. (2019). A Meta-Analytic Examination of the Continued Influence of Misinformation in the Face of Correction: How Powerful Is It, Why Does It Happen, and How to Stop It? *Communication Research*, 47(2), 155–177. <https://doi.org/10.1177/0093650219854600>

- Wood, T., & Porter, E. (2019). The Elusive Backfire Effect: Mass Attitudes' Steadfast Factual Adherence. *Political Behavior*, 41, 135–163. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9443-y>
- Zoonen, W. van, Luoma-aho, V., & Lievonen, M. (2024). Trust but verify? Examining the role of trust in institutions in the spread of unverified information on social media. *Computers in Human Behavior*, 150(6). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107992>

Tentang Penulis

Zakky Zidan adalah mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menekuni riset seputar politik digital, polarisasi, kepercayaan pada institusi, serta desain intervensi literasi media dan koreksi informasi.

Idris Hemay adalah peneliti dan Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Magister Ilmu Politik di Universitas Nasional, Jakarta. Selain di CSRC, Idris juga aktif sebagai Direktur Riset INDEX Indonesia, lembaga survei opini publik yang berfokus pada penelitian perilaku pemilih dan dinamika elektoral. Sebelumnya, ia pernah menjadi koordinator program Pesantren for Peace, kerja sama antara CSRC, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), dan Uni Eropa. Minat riset Idris mencakup politik keagamaan, politik identitas, radikalisme, perilaku politik, demokrasi dan hak asasi manusia, serta resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Ia telah menulis sejumlah buku dan publikasi akademik tentang demokrasi, moderasi beragama, dan politik elektoral di Indonesia.